JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 23/10/2026; Revised: 07/11/2026;
Accepted: 11/11/2026; Published: 11/11/2026

Peranan LPMN dalam Pembangunan SDM di Nagari Situak Ujung Gading Kabupaten Pasaman Barat

Siska Marlina[1)], Syarkawi[2)], Rofah[3)]

Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

dosen03227@unpam.ac.id[1)], dosen03005@unpam.ac.id[2)],
rofahsaputri0@gmail.com[3)]

Abstrak

Dalam dunia administrasi publik saat ini, keberhasilan desentralisasi dan otonomi daerah tidak hanya seberapa baik tata kelola lokal diterapkan, namun bagaimana masyarakat terlibat juga menjadi kunci utama. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) diharapkan menjadi mitra penting bagi pemerintah nagari dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana LPMN berkontribusi dalam pengembangan sumber daya manusia di Nagari Situak Ujung Gading, Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian juga mencoba mengidentifikasi faktor-faktor yang membantu atau menghambat pelaksanaan tugas LPMN. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, tinjauan pustaka, observasi, dan dokumentasi. Semua data kemudian dianalisis secara sistematis dan terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara teori, LPMN telah berperan sebagai fasilitator, mediator, motivator, dan pendorong perubahan di masyarakat. kendatidemikian, dalam praktiknya, kinerja LPMN belum mencapai hasil yang optimal. Ada banyak kendala yang dihadapi, baik dari struktur dan budaya lokal. Capaian LPMN terhambat karena keterbatasan kapasitas manajerial dari pengurus lembaga dan anggaran. Koordinasi antar lembaga pemerintah lokal sering kali kurang baik dan partisipasi masyarakat masih rendah. Modal sosial di masyarakat juga belum kuat, yang membuat kegiatan pengembangan sumber daya manusia menjadi lebih sulit. Dari temuan ini, dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan dan partisipatif, penguatan kapasitas institusi LPMN sangat penting. Selain itu, reformasi dalam sistem birokrasi lokal perlu dilakukan. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga masyarakat harus diperkuat. Hanya dengan cara ini, desentralisasi dan otonomi daerah bisa berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari, Pembangunan Sumber Daya Manusia, Partisipasi Publik

Abstract

In contemporary public administration, the success of decentralization and regional autonomy depends not only on the quality of local governance but also on community involvement. The Nagari Community Empowerment Institution (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari, LPMN) is expected to serve as an important partner of the nagari government in promoting community participation in local development. This study examines the contribution of LPMN to human resource development in Nagari Situak Ujung Gading, West Pasaman Regency, and identifies the factors that facilitate or hinder the performance of its duties. The study employs a qualitative approach, with data collected through interviews, a literature review, observation, and documentation, followed by systematic and structured analysis. The findings indicate that LPMN has theoretically assumed the roles of facilitator, mediator, motivator, and catalyst for change. In practice, however, its performance

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 23/10/2026; Revised: 07/11/2026;
Accepted: 11/11/2026; Published: 11/11/2026

remains suboptimal because of structural and local cultural constraints. Limited managerial capacity among institutional officers and budgetary constraints hinder its achievements. Coordination among local government institutions is often weak, while community participation remains low. Weak social capital further complicates human resource development activities. The findings suggest that strengthening LPMN's institutional capacity is essential to achieving sustainable and participatory human resource development. Reform of the local bureaucratic system is also needed, alongside stronger collaboration among government, communities, and community institutions, so that decentralization and regional autonomy can improve community welfare.

***Key words*:** *Nagari Community Empowerment Institution, Human Resource Development, Public Participation*

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional yang ideal harus diletakkan sebagai proses multidimensional yang berorientasi pada pembangunan manusia (*human centered develovement*), bukan sekedar mengejar pertumbuhan ekonomi makro. Hal tersebut didasari oleh pemahaman dalam administrasi publik modern bahwa, transformasi struktural dan pensejateraan sosial yang berkeadilan hanaya dapat dicapai apabila negara secara aktif memperluas kapasitas dasar dasar manusia serta pemberdayaan komunitas di tingkat akar rumput. Sebagaimana yang diteorikan oleh Sen, serta Todaro dan Smith pembangunan yang ideal harus menempatkan manusia sebagai subjek dan sekaligus sebagai tjuan akhir dari segala kebijakan publik dalam rangka mereduksi kesenjangan sosial (Sen, 2013; Todaro & Smith, 2020a). Keberhasilan suatu bangsa dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang berkeadilan dan merata sangat ditentukan oleh sejauh mana negara mampu mereduksi kesenjangan sosial, memberdayakan komunitas akar rumput, serta mengoptimalkan kualitas sumber daya manusianya.

Di Indonesia, diskursus mengenai pembangunan lokal mengalami pergeseran fundamental seiring dengan implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Kebijakan ini dimanifestasikan secara legal-formal melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (yang dalam konteks sosio-kultural masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat diintegrasikan ke dalam Pemerintahan Nagari) (Kaho, 1988; A. W. Siagian et al., 2023; Widjaja, 2003). Regulasi tersebut mendefinisikan desa atau nagari bukan lagi sebagai entitas administratif pasif yang hanya menerima instruksi dari pusat (*top-down*), melainkan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Berdasarkan kerangka desentralisasi fiskal dan administratif ini, nagari memegang peranan sentral sebagai basis utama akselerasi pembangunan nasional. Namun, efektivitas desentralisasi di tingkat lokal sering kali dihadapkan pada tantangan pelik berupa rendahnya daya dukung kelembagaan lokal dan belum meratanya partisipasi masyarakat dalam siklus kebijakan publik (Agus Dwiyanto, 2021; Saragih et al., 2021).

Urgensi dari pembangunan berbasis lokal ini bertumpu pada premis bahwa potensi wilayah tidak akan terutilisasi secara maksimal apabila tidak diimbangi oleh kapasitas kognitif, keterampilan, dan kesadaran kritis masyarakat setempat. Berbagai kajian empiris menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur fisik yang masif sering kali mengalami kegagalan keberlanjutan (*sustainability failure*) apabila tidak didahului atau diiringi dengan

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 23/10/2026; Revised: 07/11/2026;
Accepted: 11/11/2026; Published: 11/11/2026

pembangunan nonfisik yang menyasar penguatan modal sosial (*social capital*) dan kapasitas sumber daya manusia (Mardikanto & Soebiato, 2012a; Putnam, 2000).

Disinilah pentingnya kehadiran lembaga kemasyarakatan sebagai instrumen artikulasi kepentingan publik di tingkat akar rumput. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (serta disesuaikan dengan regulasi turunan di bawah UU Desa), negara mengamanatkan pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) atau yang lazim dikenal secara nasional sebagai Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai mitra strategis pemerintah nagari. LPMN dirancang sebagai wadah partisipasi masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam menyusun perencanaan, menggerakkan swadaya gotong royong, melaksanakan program pembangunan, hingga melakukan pengawasan sosial.

Kendati demikian, tinjauan terhadap literatur administrasi publik dan sumber daya manusia menunjukkan adanya kompleksitas teoretis dan empiris yang signifikan. Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat melalui lembaga lokal idealnya mampu menjembatani jurang komunikasi antara birokrasi pemerintahan nagari dan warga negara (*citizens*) (Chambers, 2014; Friedmann, 1992). Namun, dalam realitas empiris di berbagai daerah, efektivitas kelembagaan LPMN kerap mengalami disfungsi akibat terjebak dalam formalitas birokratis belaka. Sejumlah riset terdahulu, seperti yang dikemukakan oleh Huraerah (2020) dan Sugihen (2018), mengidentifikasi bahwa lembaga kemasyarakatan di perdesaan sering kali mengalami stagnasi peran akibat rendahnya kapasitas manajerial pengurus, minimnya alokasi anggaran operasional, serta dominasi pendekatan birokratis yang bersifat sentralistik dari aparatur pemerintah lokal. Kondisi ini menyebabkan peran LPMN tereduksi hanya sebatas pelengkap administratif, alih-alih menjadi motor penggerak partisipasi dan pembangunan kapasitas manusia (Huraerah, 2008; Kaho, 1988; Sephia et al., 2023.; A. W. Siagian et al., 2023; Sugihen, 1996) .

Lebih lanjut, apabila ditinjau secara spesifik dalam konteks wilayah Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat khususnya di Nagari Situak Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang potensi sumber daya alam yang melimpah di sektor perkebunan dan pertanian belum berbanding lurus dengan indeks pembangunan manusia (IPM) dan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Data empiris menunjukkan bahwa orientasi program pembangunan di nagari tersebut masih cenderung terkonsentrasi pada penyediaan infrastruktur fisik.Sementara itu, program-program pembangunan nonfisik yang berorientasi pada penguatan kapasitas kognitif, pelatihan keterampilan kerja, pemberdayaan ekonomi perempuan, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat masih berjalan secara sporadis dan belum terintegrasi secara sistematis (Marlina et al., 2023). Gejala ini mengindikasikan adanya celah riset (*research gap*) yang nyata, yaitu ketidakselarasan antara mandat normatif LPMN sebagai agen pemberdayaan SDM dengan realisasi empiris kinerjanya di tingkat lokal yang belum sepenuhnya menyentuh akar permasalahan kapasitas sumber daya manusia.

Meskipun sejumlah literatur Administrasi Publik kontenprer telah banyak mengkaji efektivitas tata kelola desa dan desentralisasi fiskal secara umum, misalnya (Antlöv et al., 2016; Latifah et al., 2024; Rahmania Amanda Asri et al., 2026a; Rehan et al., 2025). Sebagian besar studi tersebut masih bertumpu pada asumsi homogenitas struktural, yakni mengadopsi model administratif yang seragam yang menempatkan kepala desa sebagai

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 23/10/2026; Revised: 07/11/2026;
Accepted: 11/11/2026; Published: 11/11/2026

aktor tunggal, sebagaimana lazimya desaadministratif di Pulau Jawa. Padahal, secara secara sosiologis dan konteks wilayah adat Minangkabau di Sumatera Barat mengahadirkan anomali struktural dan menuntut pendekatan analisi yang berebeda. Di tingkat Nagari, terdapat hibriditas kelembagaan yang permanen. Dimana birokrasi pemerintahan formal (seperti wali Nagari dan Lembaga pemberdayaan Masyarakat Nagari) tidak bisa berjalan secara otonom, melainkan harus bernegosiasi dengan struktur kepemimpinan tradisional berbasis suku seperti *Ninik Mamak* dan *Alim Ulama* serta *Datuak (Rahmania Amanda Asri et al., 2026a; Rehan et al., 2025)*

Belum mendalam mengakaji gesekan fungsionalitas kelembagaan lokal seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) dalam merespon hibriditas struktur adat dan birokrasi formal (Latifah et al., 2024; Rehan et al., 2025) Umumnya kajian-kajian tersebut masih berfokus dengan potret desa yang bersifat homogen, yakni sepenuhnya bertumpu pada birokrasi formal seperti kepala desa dan Lembaga yang mengadopsi model administratif seperti lazimnya tipologi desa administratif di Pulau Jawa (Antlöv et al., 2016). Padahal, secara teoritis konteks wilayah adat minangkabau di Sumatera Barat menghadirkan hibriditas kelembagaan, yaitu birokrasi pemerintahan di Nagari harus bernegisiasi dengan struktur kepemimpinan tradisional seperti Ninik Mamak dan Alim Ulama (Rahmania Amanda Asri et al., 2026b). Lebih lanjut, mayoritas literatur yang ada cenderung mereduksi evaluasi kinerja kelembagaan lokal sebatas pada aspek akuntabillitas atau pembangunan fisik. Sementara itu bagaimana LPMN adalam mengakselerasi dimensi pemberdayaan manusia secara komprehensif belum tersentuh (Abduh et al., 2026; Abdullah et al., 2026; Pramusinto, 2025.). Oleh karena itu, investigasi ilmiah terhadap dinamika kelembagaan ini sangat krusial dilakukan guna mengisi kekosongan teoritis tersebut. Studi ini juga melihat bagaimana tata kelola partisipatif beradaptasi ditengah dualisme struktur formal dan kultural.

Berdasarkan uraian latar belakang, permasalahan serta celah akademis di atas. Perumusan tujuan penulisan penelitian ini diarahkan pada dua hal utama. Pertama, untuk menganalisis dan mendeskripsikan secara komprehensif peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) dalam pembangunan sumber daya manusia di Nagari Situak Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat. Kedua, untuk mengidentifikasi secara mendalam faktor-faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi efektivitas implementasi peran LPMN tersebut, sehingga dapat dirumuskan rekomendasi strategis bagi penguatan tata kelola pemba ngunan berbasis partisipasi di masa depan.

METODE

1. Desain Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif analitis. Pendekatan ini sengaja dipilih karena esensi dari investigasi kelembagaan lokal menuntut kedalaman (*Depth*) alih-alih keluasan (*breadth*). Melalui perspektif naturalistik (*Natural setting),* peneliti berupaya untuk membongkar realitas subjektif dan makna sosial yang didekonstruksi oleh aktor-aktor lokal di Nagari Situak Ujung Gading terhadap dinamika pembangunan sumber daya manusia (Creswell & Creswell, 2023) . Metode deskriptif analitis digunakan untuk menyajikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 23/10/2026; Revised: 07/11/2026;
Accepted: 11/11/2026; Published: 11/11/2026

fakta, karakteristik, serta hubungan antarfenomena yang diteliti tanpa memberikan perlakuan manipulatif terhadap variabel. Melalui desain ini, peneliti dapat menggali pemahaman holistik mengenai implementasi fungsi kelembagaan LPMN sebagai fasilitator, mediator, motivator, dan dinamisator, serta mengidentifikasi hambatan struktural maupun kultural yang dihadapi di lapangan.

2. Waktu dan Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan secara intensif di Nagari Situak Ujung Gading Kecamatan Lembah Meelintang Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini dilaksanakan terhitung pada bulan Januari 2026 sampai dengan bulan Februari 2026. Pemilihan rentang waktu tersebut disesuaikan dengan siklus program kerja tahunan Nagari Situak Ujung Gading. Disamping itu peneliti juga mendapatkan momentum serta evaluasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di akar rumput.

3. Partisipan dan Objek Penelitian

Penentuan informan dalam peneloitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampiling berbasis kriteria data subtansial. Informan diklasifikasikan kedalam tiga lapis strategis. Hal ini dilakukan untuk memotret ketegangan struktural antara non formal dan kultural secara objektif (Creswell & Creswell, 2023):

- Lapis pengambil Kebijakan: Aparat Pemerintahan nagari (wali nagari beserta perangkat) untuk menggali data sinergi birokrasi dan dukungan anggaran
- Lapis penggerak kelembagaan: Pengurus LPMN Nagari Situak Ujung Gading: Untuk mendapatkan informasi mendasar mengenai program kerja, pelaksanaan kegiatan pemberdayaan, serta kendala internal kelembagaan.
- Lapis kontrol sosial dan penerima manfaat: Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, dan Tokoh Perempuan: Untuk mengevaluasi sejauh mana dampak program pemberdayaan dirasakan langsung oleh masyarakat serta mengukur tingkat partisipasi warga dalam siklus pembangunan nagari.

4. Teknik Pengumpulan Data Instrumen

Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis yang paling utama dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data yang memenuhi standar validitas ilmiah(Sugiyono, 2021). Pengumpulan data dalam penelitian ini memadukan data primer dan data sekunder melalui tiga metode utama:

- Wawancara Mendalam (*In-Depth Interview*): Dilakukan secara tatap muka dan semi-terstruktur dengan para informan kunci guna menggali informasi mendalam, opini, pengalaman, dan pandangan mereka terkait peran LPMN dalam pembangunan SDM.
- Observasi Partisipatif Terbatas: Pengamatan langsung terhadap aktivitas kelembagaan dan keterlibatan masyarakat di Nagari Situak Ujung Gading untuk mencocokkan kesesuaian antara informasi verbal dari wawancara dengan realitas di lapangan (Moleong, 1989) .
- Studi Dokumentasi dan Pustaka: Penelusuran data sekunder melalui dokumen resmi nagari, peraturan perundang-undangan terkait (seperti UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP No. 72 Tahun 2005), laporan kegiatan LPMN, jurnal ilmiah bereputasi, serta buku teks referensi yang relevan guna memperkuat landasan empiris dan teoretis penelitian.

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 23/10/2026; Revised: 07/11/2026;
Accepted: 11/11/2026; Published: 11/11/2026

5. Teknik Uji Keabsahan Data

Untuk memastikan kredibilitas dan validitas data kualitatif, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber (membandingkan informasi dari pengurus LPMN, aparatur nagari, tokoh adat, dan masyarakat) serta triangulasi teknik (mencocokkan hasil wawancara dengan dokumen arsip nagari dan observasi lapangan).

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif (*interactive model of* analysis) yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (Miles et al., 2014). Proses analisis data kualitatif ini berlangsung secara siklus dan terus-menerus selama dan setelah proses pengumpulan data di lapangan, yang terdiri dari empat tahapan utama:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*): Mengumpulkan seluruh data mentah dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.
2. Kondensasi Data (*Data Condensation*): Merujuk pada proses pemilihan (*selection*), penyederhanaan (*simplification*), pengabstrakan, dan transformasi data mentah dari catatan lapangan menjadi bentuk yang lebih terstruktur. Pada tahap ini, peneliti memfokuskan data pada substansi utama mengenai peranan LPMN dan kendala pembangunan SDM.
3. Penyajian Data (*Data Display*): Menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk teks naratif uraian sistematis, matriks, atau kategori tematik agar mudah dipahami secara komprehensif.
4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Drawing and Verifying Conclusions*): Menarik makna dari data yang telah dianalisis. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan terus diverifikasi dengan bukti-bukti valid di lapangan hingga diperoleh kesimpulan yang kredibel, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) di tingkat lokal merupakan fondasi utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, mandiri, dan berkelanjutan. Keberhasilan pembangunan di perdesaan atau nagari sangat ditentukan oleh efektivitas tata kelola kelembagaan lokal dan partisipasi aktif masyarakat sebagai subjek pembangunan (Soetomo., 2011; Todaro & Smith, 2020b). Berdasarkan kerangka desentralisasi dan otonomi daerah, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) di Nagari Situak Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, memegang mandat normatif sebagai mitra strategis pemerintah nagari. Lembaga ini bertugas menjembatani kepentingan masyarakat, menggerakkan swadaya gotong royong, serta mengoptimalkan peningkatan kapasitas SDM.

Bagian ini memaparkan temuan utama hasil penelitian lapangan yang dihimpun melalui wawancara mendalam dengan informan kunci (pengurus LPMN, aparatur pemerintah nagari, tokoh masyarakat, pemuda, dan perempuan), observasi partisipatif, serta analisis dokumentasi kemudian didiskusikan dan dikomparasikan secara kritis dengan teori administrasi publik serta temuan-temuan dari penelitian terdahulu yang relevan.

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 23/10/2026; Revised: 07/11/2026;
Accepted: 11/11/2026; Published: 11/11/2026

Profil Kelembagaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) Situak Ujung Gading

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) di Nagari Situak Ujung Gading merupakan organisasi kemasyarakatan yang dibentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat. Berdasarkan hasil studi dokumentasi dan wawancara dengan unsur aparatur pemerintah nagari, pembentukan dan legalitas kepengurusan LPMN berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Nagari. LPMN berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merumuskan, merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi jalannya pembangunan nagari.

Struktur kepengurusan LPMN Nagari Situak Ujung Gading terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, serta beberapa seksi teknis yang membidangi bidang pembangunan fisik, ekonomi, sosial kemasyarakatan, pendidikan, agama, dan pemberdayaan perempuan. Berdasarkan hasil observasi terhadap dokumen kelembagaan, proses pemilihan pengurus dilakukan secara musyawarah dan mufakat oleh perwakilan masyarakat dan disahkan melalui Keputusan Wali Nagari. Secara administratif, lembaga ini memiliki struktur yang lengkap di atas kertas. Kendati demikian, tinjauan mendalam menujukkan adanya ketimpangan antara legalitas formal (*das solen*) dan realitas oerasional (d*as sein*). fungsionalitas struktur tersebut sangat bergantung pada dinamika interaksi internal, tingkat komitmen pengurus, serta dukungan fiskal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag).

Karakteristik Informan Penelitian

Validitas data kualitatif sangat ditentukan oleh kredibilitas informan yang memberikan *informasi*. Penelitian ini melibatkan beragam informan yang diklasifikasikan ke dalam kategori informan kunci (*key informants*) dan informan pendukung untuk memastikan objektivitas data. Berdasarkan hasil rekapitulasi karakteristik informan di lapangan:

1. Unsur Pengurus LPMN (3 orang): Terdiri atas Ketua dan pengurus harian LPMN Nagari Situak Ujung Gading. Informan ini memberikan data primer terkait mekanisme kerja organisasi, hambatan operasional, dan realisasi program kerja.
2. Aparat Pemerintah Nagari (2 orang): Terdiri dari Sekretaris Nagari dan Kasi Kesejahteraan Sosial. Informan ini memberikan data mengenai bentuk dukungan birokrasi, sinkronisasi program nagari dengan LPMN, serta aspek penganggaran.
3. Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, dan Tokoh Perempuan (5 orang): Mewakili elemen warga yang menjadi sasaran sekaligus partisipan pembangunan. Sebagian besar informan berada di rentang usia (35-60) tahun. Informan ini memberikan spektrum pandangan yang komprehensif dari perspektif birokratis hingga sosiologis-kultural. Hasil penelusuran karakteristik menunjukkan bahwa sebagian besar informan berada pada rentang usia produktif (35–55 tahun) dengan tingkat pendidikan yang bervariasi dari SLTA hingga sarjana. Variasi latar belakang ini memberikan spektrum pandangan yang komprehensif, mulai dari perspektif normatif-birokratis hingga perspektif sosiologis-kultural masyarakat akar rumput.

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 23/10/2026; Revised: 07/11/2026;
Accepted: 11/11/2026; Published: 11/11/2026

Peranan LPMN dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia

Pembangunan sumber daya manusia tidak sekadar diukur dari peningkatan kuantitas fasilitas fisik, melainkan dari transformasi kapasitas kognitif, keterampilan, mental, dan kesejahteraan sosial masyarakat (Hasibuan, 2010; S. P. . Siagian, 1995) .Berdasarkan hasil analisis data lapangan, peranan LPMN di Nagari Situak Ujung Gading dievaluasi melalui empat dimensi fungsional utama, yaitu sebagai fasilitator, mediator, motivator, dan dinamisator.

1. Peranan LPMN sebagai Fasilitator

Dalam teori pemberdayaan masyarakat, fasilitator bertindak sebagai pihak yang mempermudah proses interaksi, merangsang kesadaran kritis, dan membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam merumuskan kebutuhan mereka sendiri (Destiawati, 2026; Mardikanto & Soebiato, 2012, 2012) . Di Nagari Situak Ujung Gading, peran LPMN sebagai fasilitator terlihat pada keterlibatan mereka dalam memfasilitasi pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari (Musrenbangnag). LPMN bertugas menampung usulan-usulan program dari tingkat dusun untuk dibawa ke forum musyawarah nagari.

Namun, hasil wawancara mendalam dengan unsur tokoh masyarakat dan pengurus LPMN mengungkapkan bahwa peran fasilitatif ini belum berjalan secara optimal. Berdasarkan hasil observasi saat Musrenbang nagari, partisipasi masyarakat cenderung bersifat pasif. Sebagian besar warga yang hadir memosisikan diri sebagai pendengar dan kurang aktif dalam menyampaikan gagasan konstruktif terkait pembangunan nonfisik atau peningkatan kapasitas SDM.

> *"Kami dari pengurus sudah berupaya mengundang masyarakat dalam setiap musyawarah dusun maupun nagari untuk menjaring usulan pelatihan atau peningkatan keterampilan. Tapi kendalanya, masyarakat sering kali lebih antusias mengusulkan pembangunan fisik seperti pengecoran jalan atau drainase, sementara usulan untuk pelatihan SDM pemuda atau perempuan sangat minim. Ketika hadir pun, warga jarang yang bersuara aktif memberikan masukan,"* ungkap Ketua LPMN Nagari Situak Ujung Gading (Hasil Wawancara, Januari 2026).

Temuan ini sejalan dengan pandangan Soetomo (2011) yang menyatakan bahwa dalam masyarakat perdesaan transisional, budaya partisipasi sering kali terhambat oleh mentalitas paternalistik, di mana warga terbiasa menunggu instruksi (*top-down*) daripada menginisiasi kebutuhan secara mandiri (*bottom-up*)(Soetomo., 2011). Akibatnya, fasilitasi yang dilakukan LPMN terjebak pada tataran formalitas prosedural administratif, alih-alih menjadi ruang emansipasi partisipasi publik.

2. Peranan LPMN sebagai Mediator

Peran mediator menuntut LPMN untuk berdiri di tengah sebagai jembatan komunikasi yang efektif antara aspirasi warga akar rumput di satu sisi, dengan kebijakan dan kewenangan birokrasi pemerintah nagari di sisi lain. Efektivitas mediasi ini sangat menentukan tingkat akuntabilitas dan responsivitas program pemerintah terhadap kebutuhan nyata masyarakat (Chambers, 2014; Suhu et al., 2026).

Berdasarkan hasil penelitian, peran mediator LPMN di Nagari Situak Ujung Gading tergolong cukup baik dalam hal diseminasi informasi formal. LPMN secara berkala

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 23/10/2026; Revised: 07/11/2026;
Accepted: 11/11/2026; Published: 11/11/2026

menyampaikan kebijakan dan jadwal kegiatan pembangunan nagari kepada masyarakat melalui rapat-rapat kelompok maupun forum informal. Kendati demikian, hambatan struktural muncul pada aspek pemerataan arus informasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh pemuda dan ibu-ibu setempat:

> *"Kalau sosialisasi program atau informasi dari nagari sebenarnya ada, tapi sering kali sampainya lewat perantara atau cuma ke orang-orang yang memang sudah dekat dengan pengurus atau tokoh tertentu saja. Kami yang di dusun atau pemuda di pinggiran ini jarang sekali dilibatkan dari awal. Tahu-tahu programnya sudah jalan atau bahkan sudah selesai. Jadi, rasanya informasi itu mandek di kalangan elit atau kelompok tertentu saja, tidak sampai merata ke bawah."* (Tokoh Pemuda Nagari Situak Ujung Gading, Wawancara Januari 2026)

> *"Kami dari kelompok ibu-ibu atau warga yang di bawah jarang tahu kalau ada musyawarah pelatihan atau program pemberdayaan khusus perempuan. Undangan biasanya berputar di situ-situ saja, ke orang yang itu lagi. Akibatnya, kami yang butuh pelatihan keterampilan merasa terasing dan tidak tahu bagaimana cara menyalurkan aspirasi ke pemerintah nagari melalui LPMN."* (Perwakilan Kelompok Perempuan/Warga, Wawancara Januari 2026)

> *"Kami akui fungsi mediasi dan penyebaran informasi belum merata. Selama ini kami mengandalkan pengurus dusun atau kepala wilayah untuk meneruskan informasi ke bawah. Kendalanya, jaringan komunikasi horizontal antarwarga di dusun terpencil sangat lemah, sehingga informasi kegiatan sering kali berhenti di tingkat tokoh lokal saja dan tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara utuh."* **(**Pengurus Inti LPMN Nagari Situak Ujung Gading, Wawancara Januari 2026)

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Informasi cenderung berputar di kalangan elit lokal atau warga yang secara aktif tergabung dalam organisasi tertentu. Akibatnya, kelompok rentan, kelompok tani marjinal, dan pemuda di dusun terpencil sering kali terasing dari informasi program pemberdayaan. Hal ini mengonfirmasi temuan Pratama dan Rahmawati (2024) yang menyatakan bahwa komunikasi kelembagaan desa di Indonesia kerap mengalami distorsi akibat lemahnya jaringan informasi horizontal di tingkat akar rumput (Pratama, 2024; Rustanto et al., 2024; Warsono et al., 2025).

3. Peranan LPMN sebagai Motivator

Motivator adalah agen yang membangkitkan gairah, dorongan psikologis, dan kesadaran kolektif masyarakat untuk bergerak maju, menumbuhkan rasa percaya diri, serta memelihara semangat gotong royong(Syakhirul Alim et al., 2026) . Dalam konteks pembangunan SDM, peran motivator sangat krusial untuk menanamkan *sense of belonging* (rasa memiliki) terhadap program-program pemberdayaan yang digulirkan.

Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa masyarakat di Nagari Situak Ujung Gading telah memanfaatkan berbagai fasilitas umum dan sarana sosial yang dibangun atas fasilitasi pemerintah nagari dan LPMN, seperti gedung serbaguna, balai pemuda, serta sarana prasarana penunjang kegiatan keagamaan. Hal ini mengindikasikan bahwa motivasi dasar warga untuk menggunakan fasilitas publik sudah terbangun.

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 23/10/2026; Revised: 07/11/2026;
Accepted: 11/11/2026; Published: 11/11/2026

Namun, tantangan besar ditemukan pada aspek pemeliharaan dan keberlanjutan. Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat nagari, kesadaran masyarakat dalam merawat fasilitas atau menjaga keberlangsungan program nonfisik (seperti kelompok usaha bersama atau pelatihan keterampilan) masih tergolong rendah.

> *"Masyarakat antusias kalau ada bantuan fisik atau kegiatan pelatihan yang sifatnya insidental dan ada uang saku. Tapi begitu kegiatan selesai dan diminta untuk mandiri merawat atau mengembangkan kelompok usaha, partisipasinya langsung menurun drastis. Masih ada anggapan bahwa semua urusan pemeliharaan adalah tanggung jawab penuh pemerintah nagari,"* ujar Kasi Kesejahteraan Nagari Situak Ujung Gading (Hasil Wawancara, Januari 2026).

Fenomena ini menunjukkan bahwa peran LPMN sebagai motivator belum berhasil mentransformasikan motivasi sesaat (*episodic motivation*) menjadi kesadaran kolektif yang berkelanjutan (*sustained social awareness*) (Mahendra, 2025) . Hal ini sejalan dengan tesis Putnam (2000) mengenai modal sosial (*social capital*), di mana penurunan kohesi sosial dan menipisnya semangat gotong royong di tingkat lokal akan melemahkan kapasitas komunitas dalam mengelola aset kolektif secara mandiri (Putnam, 2000) .

4. Peranan LPMN sebagai Dinamisator

Dinamisator merupakan fungsi penggerak, pemantau, dan pengawas jalannya program pembangunan agar tetap berada pada jalur yang sesuai dengan tujuan awal, serta mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan sosial (Friedmann, 1992). Peran ini menuntut pengurus LPMN aktif melakukan monitoring, evaluasi, dan pendampingan berkelanjutan terhadap pelaksanaan program kerja.

Berdasarkan hasil analisis data empiris, peran LPMN sebagai dinamisator di Nagari Situak Ujung Gading merupakan aspek yang paling lemah dibandingkan fungsi lainnya. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dokumen, pengawasan dan evaluasi terhadap program pembangunan khususnya program nonfisik yang berorientasi pada peningkatan kapasitas SDM hampir tidak berjalan secara sistematis. LPMN umumnya hanya aktif pada fase perencanaan (Musrenbang) dan fase seremonial pelaksanaan awal program, namun melemah pada fase pasca-pelaksanaan (*post-implementation evaluation*).

Lemahnya fungsi pengawasan ini dikonfirmasi langsung oleh Sekretaris Nagari Situak Ujung Gading yang menyatakan:

> *"Setelah program atau pelatihan itu berjalan, pengawasan dan evaluasi keberlanjutannya hampir tidak ada. Kami di nagari juga kesulitan memantau karena tidak punya instrumen atau format penilaian kinerja yang baku untuk mengukur sejauh mana dampak pelatihan SDM itu berhasil. Akibatnya, banyak program pelatihan keterampilan yang selesai begitu saja tanpa ada tindak lanjut atau pendampingan lanjutan bagi pesertanya,"* (Sekretaris Nagari Situak Ujung Gading, Wawancara Januari 2026).

Pengurus LPMN juga mengakui adanya keterbatasan internal dalam menjalankan fungsi pengawasan. Pengurus menyatakan bahwa ketiadaan pelatihan manajerial khusus serta belum adanya mandat regulasi internal yang tegas membuat mereka kesulitan untuk turun tangan ketika program mangkrak. Secara akumulatif, kondisi ini menyebabkan

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 23/10/2026; Revised: 07/11/2026;
Accepted: 11/11/2026; Published: 11/11/2026

efektivitas program pemberdayaan SDM sulit diukur secara empiris, sehingga banyak program peningkatan kapasitas yang berhenti di tengah jalan tanpa evaluasi tindak lanjut yang komprehensif.

Lemahnya fungsi dinamisator ini disebabkan oleh ketiadaan instrumen pengukuran kinerja yang baku, minimnya pelatihan manajemen bagi pengurus LPMN, serta ketiadaan mandat pengawasan yang tegas dari regulasi internal nagari. Akibatnya, efektivitas program pemberdayaan SDM sulit diukur secara empiris, dan banyak program yang mangkrak tanpa ada evaluasi tindak lanjut yang komprehensif.

Faktor Pendukung dan Penghambat Kinerja LPMN

Berdasarkan keseluruhan temuan lapangan, efektivitas peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) dalam pembangunan SDM di Nagari Situak Ujung Gading dipengaruhi oleh dua kelompok faktor utama, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat.

1. Faktor Pendukung

- Legalitas dan Kelembagaan Formal: Adanya payung hukum yang jelas melalui UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP No. 72 Tahun 2005 memberikan legitimasi struktural bagi keberadaan LPMN sebagai mitra resmi pemerintah nagari.
- Dukungan Politik dan Anggaran Pemerintah Nagari: Pemerintah Nagari Situak Ujung Gading secara konsisten mengalokasikan anggaran melalui APBNag untuk operasional kelembagaan dan mendukung beberapa kegiatan fisik maupun sosial kemasyarakatan.
- Adanya Tokoh Lokal yang Progresif: Keberadaan sebagian kecil tokoh masyarakat, pemuda, dan kader pemberdayaan yang memiliki kepedulian tinggi menjadi motor penggerak utama dalam pelaksanaan kegiatan sosial di nagari.

2. Faktor Penghambat

- Faktor Internal Kelembagaan: Keterbatasan kapasitas manajerial dan penguasaan teknik fasilitasi pembangunan oleh sebagian besar pengurus LPMN. Pengurus sering kali merangkap peran dan belum memiliki pelatihan khusus terkait manajemen pemberdayaan masyarakat modern.
- Rendahnya Partisipasi dan Kesadaran Kritis Masyarakat: Budaya apatis, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, serta dominasi orientasi materialistis jangka pendek membuat warga kurang tertarik mengikuti program peningkatan kapasitas nonfisik yang tidak memberikan hasil instan.
- Keterbatasan Fiskal dan Sarana Pendukung: Meskipun ada alokasi anggaran dari nagari, porsi dana yang dikhususkan secara spesifik untuk program pemberdayaan SDM nonfisik masih sangat terbatas dibandingkan alokasi untuk pembangunan infrastruktur fisik.
- Lemahnya Koordinasi Birokrasi: Hubungan koordinasi antara LPMN, pemerintah nagari, dan kelembagaan adat/lokal lainnya belum terintegrasi secara sinergis, yang kerap menimbulkan tumpang tindih program dan lemahnya kontrol pengawasan bersama.

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 23/10/2026; Revised: 07/11/2026;
Accepted: 11/11/2026; Published: 11/11/2026

Diskusi dan Komparasi dengan Teori serta Penelitian Terdahulu

Temuan penelitian di Nagari Situak Ujung Gading menegaskan adanya kesenjangan antara *das* sollen dan *das sein*. Dalam perspektif *collaborative governance* pilar masyarakat sipil melalui LPMN berfungsi sebagai mitra yang setara (*equal Partner*). Melainkan tereduksi menjadi perpanjang tanganan birokrasi (*government existension*). (Agus Dwiyanto, 2021; Ansell & Gash, 2008).Temuan ini sejalan dengan hasil riset empiris yang dilakukan oleh Huraerah (2020) dan Sugihen (2018), yang menyimpulkan bahwa lembaga kemasyarakatan di perdesaan sering kali mengalami stagnasi peran akibat terperangkap dalam rutinitas administratif, minimnya inovasi kelembagaan, dan rendahnya tingkat partisipasi aktif warga (Huraerah, 2008; Sugihen, 1996).

Lebih lanjut, studi-studi mutakhir yang dilakukan oleh Mahendra (2025) serta Dawali et al. (2025) menegaskan bahwa pengelolaan anggaran dan desentralisasi fiskal di tingkat lokal kerap kali mengalami bias pembangunan fisik (*infrastructure bias*). Alokasi anggaran desa teridentifikasi lebih banyak menyerap pembiayaan konstruksi fisik jangka pendek dibandingkan investasi jangka panjang pada pembangunan modal manusia (human capital investment), yang pada akhirnya membatasi efektivitas kelembagaan lokal dalam mengoptimalkan kapasitas sumber daya manusia (Andani et al., 2026; Dawali et al., 2025; Mahendra, 2025; Masyarakat Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Duta Inovasi et al., 2024; Pratama, 2024; Putra, 2023; Syakhirul Alim et al., n.d.; Telaumbanua & Ziliwu, 2022) .

Apabila ditarik dalam konteks spesifik masyarakat nagari di Sumatera Barat, tantangan kultural juga memegang peranan penting. Nagari Situak Ujung Gading yang memiliki karakteristik sosial-budaya khas Minangkabau seharusnya mampu mengoptimalkan nilai-nilai kearifan lokal seperti *musyawarah mufakat* dan *gotong royong* sebagai modal sosial (*social capital*) untuk mendongkrak partisipasi warga (Putnam, 2000). Namun, temuan penelitian membuktikan bahwa pergeseran orientasi sosial menuju individualisme ekonomi dan melemahnya fungsi kerapatan adat serta lembaga nagari dalam menggerakkan partisipasi pemuda telah mereduksi efektivitas kerja LPMN.

Oleh karena itu, penguatan peran LPMN dalam pembangunan SDM menuntut adanya pergeseran paradigma (*paradigm shift*) dari pendekatan birokratis-administratif menuju pendekatan pemberdayaan partisipatif yang transformatif. Pemerintah nagari bersama LPMN perlu melakukan reorientasi program, peningkatan kapasitas pengurus (*capacity building*), perbaikan sistem komunikasi publik, serta merumuskan instrumen evaluasi kinerja berbasis partisipasi masyarakat agar pembangunan sumber daya manusia di Nagari Situak Ujung Gading dapat berjalan secara efektif, mandiri, dan berkelanjutan.

SIMPULAN DAN SARAN

Secara teoretis, penelitian ini membuktikan bahwa dalam melihat efektivitas kelembagaan di tingkat lokal tidak dapat dibaca semata-mata melalui lensa legalitas normatif (*das sollen*), melainkan sangat ditentukan oleh kemampuan merespons gesekan sruktural antara birokrasi formal dan tatanan lokal. Kasus di Nagari Situak Ujung Gading menegaskan bahwa dominasi *infrastructure bias* dalam alokasi fiskal desa melahirkan disinsentif struktural yang menjebak partisipasi masyarakat dalam lingkaran *episodic motivation*, sekaligus memperlemah fungsi modal sosial (*social capital*). Akibatnya, institusi seperti LPMN mengalami pergeseran fungsi dari yang semula diproyeksikan sebagai pilar

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 23/10/2026; Revised: 07/11/2026;
Accepted: 11/11/2026; Published: 11/11/2026

otonom *collaborative governance* menjadi sekadar perpanjangan tangan birokrasi (*government extension*) yang terjebak dalam formalitas prosedural.

Secara praktis, temuan ini memberikan implikasi krusial, bahwa penguatan tata kelola pembangunan berbasis partisipasi di wilayah adat menuntut adanya pergeseran paradigma (*paradigm shift*). Intervensi kebijakan ke depan tidak boleh lagi pukul rata (*asymmetric approach*), melainkan harus berfokus pada tiga pilar utama: (1) reorientasi anggaran yang berimbang antara pembangunan fisik dan investasi modal manusia (*human capital*), (2) pelembagaan instrumen evaluasi kinerja pasca-program yang akuntabel, serta (3) revitalisasi komunikasi publik berbasis kearifan lokal guna mentransformasikan partisipasi pasif menjadi kesadaran kolektif yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Abduh, M., Erina, L., & Kuswandi, A. (2026). *Journal of Governance and Public Policy Institutional and Environmental Conditions Associated with Village Deliberation Intensity in Rural South Sumatra, Indonesia*. *13*(3), 2549–7669. https://doi.org/10.18196/jgpp.v13i3.30466

Abdullah, A., Lala, A., Sutarjo, S., Khumayah, S., & Daimah, D. (2026). From Policy to Practice: How Decentralization Reshapes Village Political Institutions in Indonesia. *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation*, *6*(2), 314–324. https://doi.org/10.35877/454RI.daengku4935

Agus Dwiyanto. (2021). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia* (A. Dwiyanto, Ed.). UGM Press.

Andani, H., Muhamad Husein Maruapey, & Cecep Wahyudin. (2026). The Implementation of Good Corporate Governance and Its Impact on the Institutional Capacity of Village-Owned Enterprises. *International Journal of Applied Research and Sustainable Sciences*, *4*(3), 215–226. https://doi.org/10.59890/ijarss.v4i3.209

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, *18*(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032

Antlöv, H., Wetterberg, A., & Dharmawan, L. (2016). Village Governance, Community Life, and the 2014 Village Law in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, *52*(2), 161–183. https://doi.org/10.1080/00074918.2015.1129047

Chambers, Robert. (2014). *Rural development : putting the last first*. Taylor and Francis.

Creswell, J. W. ., & Creswell, J. David. (2023). *Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. SAGE.

Dawali, N., Canon, S., Hadi, F., & Akib, Y. (2025). PENGARUH DANA DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA PARIS KECAMATAN MOOTILANGO KABUPATEN GORONTALO. In *Jurnal Ekonomi Pembangunan* (Vol. 7, Number 2).

Destiawati, E. (2026). *PEMBERDAYAAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI BANK SAMPAH DI DESA SARIWANGI KECAMATAN PARONGPONG KABUPATEN BANDUNG BARAT*. https://doi.org/10.36859/jp.v2i3.5300

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 23/10/2026; Revised: 07/11/2026;
Accepted: 11/11/2026; Published: 11/11/2026

Friedmann, John. (1992). *Empowerment : the politics of alternative development*. Blackwell.

Hasibuan, M. S. P. . (2010). *Manajemen sumber daya manusia* (Hasibuan, Ed.). Bumi Aksara.

Huraerah, Abu. (2008). *Pengorganisasian dan pengembangan masyarakat : model & strategi pembangunan berbasis kerakyatan*. Humaniora.

Kaho, J. Riwu. (1988). *Prospek otonomi daerah di Negara Republik Indonesia*. Rajawali Pers.

Latifah, N., Ningsih, Y., Assyahri, W., & Mohammad Natsir Bukittinggi, U. (2024). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Nagari di Sumatera Barat. In *JPAMS : Journal of Public Administration and Management Studies* (Vol. 2). https://journal.umnyarsi.ac.id/index.php/JPAMS

Mahendra, P. (2025). Inovasi Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif Berkelanjutan. *JURNAL ECONOMINA*, *4*(7), 244–251. https://doi.org/10.55681/economina.v4i7.1565

Mardikanto, Totok., & Soebiato, Poerwoko. (2012a). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Alfabeta.

Marlina, S., Frinaldi, A., & Magriasti, L. (2023). Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat). *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, *7*(3), 2419. https://doi.org/10.58258/jisip.v7i3.5426

Masyarakat Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Duta Inovasi, P., Universitas Trilogi, M., Desa Cibitung Tengah, J., Tenjolaya, K., Bogor Zainul Kisman, K., Fera Risina, D., Fitra Andriana, Y., Rangga Putra, D., & Trilogi Jakarta, U. (2024). *ADM: Jurnal Abdi Dosen dan Mahasiswa*. (2), 237–242. https://doi.org/10.61930/jurnaladm

Miles, M. B. ., Huberman, A. M. ., & Saldaña, Johnny. (2014). *Qualitative data analysis : a methods sourcebook*. SAGE Publications, Inc.

Moleong, L. J. . (1989). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

Pramusinto, A. (2025). *Decentralization in Indonesia: Challenges and Improvements*.

Pratama, A. , & R. D. (2024). The role of village community empowerment institutions in local development. *Padjadjaran Journal of Public Administration*.

Putnam, R. D. . (2000). *Bowling alone*. Simon & Schuster.

Putra, F. (2023). Village Governance and Public Participation in Indonesia. *Journal of Interdisciplinary Socio-Economic and Community Study*, *3*(2), 55–64. https://doi.org/10.21776/jiscos.03.2.02

Rahmania Amanda Asri, Wizi Wulandari, Evi Afrina Susanti, Rizqi Putra Pelani, & Novita Efendi. (2026a). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pendekatan Partisipatif Melalui Program Kuliah Kerja Nyata Universitas Negeri Padang di Nagari Sikucur, Kabupaten Padang Pariaman. *ARDHI : Jurnal Pengabdian Dalam Negri*, *4*(1), 158–169. https://doi.org/10.61132/ardhi.v4i1.1891

Rahmania Amanda Asri, Wizi Wulandari, Evi Afrina Susanti, Rizqi Putra Pelani, & Novita Efendi. (2026b). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pendekatan Partisipatif Melalui Program Kuliah Kerja Nyata Universitas Negeri Padang di Nagari Sikucur, Kabupaten Padang Pariaman. *ARDHI : Jurnal Pengabdian Dalam Negri*, *4*(1), 158–169. https://doi.org/10.61132/ardhi.v4i1.1891

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 23/10/2026; Revised: 07/11/2026;
Accepted: 11/11/2026; Published: 11/11/2026

Rehan, A., Rahmadana, O., Saputra, A., Zulfitri, E., & Saputri, D. (2025). *Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Nagari Lubuk Alung Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat Systematic Literature Review*.

Rustanto, A. E., Nurrahmah, N., & Aima, M. H. (2024). The Role Of Local Non-Governmental Organization In Managing Kahianga Tourism Village. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, *8*(1), 1–14. https://doi.org/10.24198/jmpp.v8i1.50989

Saragih, H., Dhea, |, Lisnawati, Z., Hamdan, H. |, Tia, F. |, Robert, E., Siregar, T., Nunik, |, Eko, Y. E., Einar, S., & Soleiman, C. (2021). *Hak Cipta Buku Kemenkum dan HAM Nomor : 000256460*. http://insaniapublishing.com

Sen, Amartya. (2013). *Development as freedom*. Anchor Books.

Sephia, J., Prasetyanti, R., Stia, P., & Jakarta, L. (2026). *ANALISIS COLLABORATIVE GOVERNANCE PADA PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) KELURAHAN STUDI KASUS KELURAHAN SAWAH KECAMATAN CIPUTAT KOTA TANGERANG SELATAN*.

Siagian, A. W., Fajar, H. F., & Alify, R. F. (2023). QUO VADIS EKSISTENSI KEDUDUKAN PEMERINTAHAN NAGARI: ANALISIS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN TERENDAH PROVINSI SUMATERA BARAT. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, *12*(1). https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v12i1.1093

Siagian, S. P. . (1995). *Manajemen sumber daya manusia* (Siagian, Ed.). Bumi Aksara.

Soetomo. (2011). *Pemberdayaan masyarakat : mungkinkah muncul antitesisnya?* (Soetomo, Ed.). Pustaka Pelajar.

Sugihen, B. T. . (1996). *Sosiologi pedesaan : (suatu pengantar)*. RajaGrafindo Persada.

Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D / Sugiyono* (Sugiyono, Ed.; Cetakan Ke-3). Alfabeta.

Suhu, B. La, Radjak, D. A., & Pora, R. (2026). Budget Limitations and Policy Implementation Outcomes in Community Empowerment Programs. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, *15*(2), 264–274. https://doi.org/10.33366/jisip.v15i2.3740

Syakhirul Alim, W., Orba Manullang, S., Aziz, F., Romadhon, S., Marganingsih, A., Marendah Ratnaningtyas, E., Sulandjari, K., Wulandari, R., & Efendi, Y. (n.d.). *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep dan Strategi*. Retrieved www.gaptek.id

Telaumbanua, A., & Ziliwu, N. (2022). Analisis Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi*, *1*(1), 108–123. https://doi.org/10.56248/jamane.v1i1.21

Todaro, M. P. ., & Smith, S. C. . (2020a). *Economic development*. Pearson.

Warsono, H., Muhamad, J. A., Fitrianto, M. R., Yusuf, I. M., Astuti, R. S., & Priyadi, B. P. (2025). Analysis of Village Development Policy and Village Community Empowerment in Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, *1537*(1), 012032. https://doi.org/10.1088/1755-1315/1537/1/012032

Widjaja, H. A. W. . (2003). *Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh*. Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada.

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.